

LAPORAN PENELITIAN

KAJIAN KEPEMIMPINAN LOKAL DAN PERILAKU MEMILIH DI KABUPATEN BLORA



Oleh :

Drs. Susilo Utomo
NIP.131 475 701

UPY-FUS
No. Daft: 639/KI/FISIP/CI
Tgl. : 20-11-2007

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, maka Buku Laporan Penelitian ” Kepemimpinan Lokal dan Perilaku Memilih di Kabupaten Blora” berhasil diselesaikan.

Buku Laporan Penelitian ” Kepemimpinan Lokal dan Perilaku Memilih di Kabupaten Blora” ini terdiri dari bab satu pendahuluan yang berisi dasar pemikiran, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, hasil yang diharapkan, manfaat yang diperoleh, kajian pustaka, dan metode penelitian. Bab dua berisi peta politik. Bab tiga berisi temuan penelitian. Bab empat berisi penutup.

Kami berharap agar Buku Laporan Penelitian ” Kepemimpinan Lokal dan Perilaku Memilih di Kabupaten Blora” ini dapat berguna sebagai bahan acuan dan dasar dalam menyongsong Pilkada langsung di Kabupaten Blora.

Semarang, Desember 2004

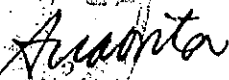
Peneliti

Halaman Pengesahan

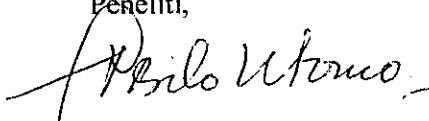
A. Judul Penelitian	: "Kepemimpinan Lokal dan Perilaku Memilih di Kabupaten Blora"
B. Ketua Penelitian :	
1. Nama Lengkap dan Gelar	: Drs. Susilo Utomo
2. Golongan/Pangkat	: III D
3. NIP	: 131 475 701
4. Jabatan Fungsional	: Lektor
5. Fakultas/Jurusan	: ISIP/Ilmu Pemerintahan Undip
C. Peneliti	: Drs. Susilo Utomo
D. Lokasi Penelitian	: Kabupaten Blora
E. Waktu Penelitian	: 3 bulan (Oktober – Desember 2004)
F. Biaya Penelitian	: Rp. 6.000.000
G. Sumber Dana	: Mandiri

Semarang, Desember 2004

Mengetahui,
Dekan FISIP


Drs. Warsito, SU
NIP. 130 937 450

Peneliti,


Drs. Susilo Utomo
NIP. 131 475 701

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran	I - 1
B. Ruang Lingkup Penelitian	I - 2
C. Rumusan Masalah	I - 2
D. Hasil Yang Diharapkan	I - 2
E. Manfaat Yang Diperoleh	I - 2
F. Kajian Pustaka	I - 3
G. Metode Penelitian	I - 5
BAB II PETA POLITIK KABUPATEN BLORA	II - 1
BAB III TEMUAN PENELITIAN	III - 1
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	IV - 1
4.2. Saran	IV - 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Paling tidak ada dua hal penting yang perlu dicermati pada pemilihan Kepala daerah secara langsung menyusul disahkannya undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [lihat Pasal 24 ayat (5)]. Pertama, aspek aseptabilitas (*acceptability*) dan yang kedua, aspek kapabilitas (*capability*) dari seorang calon kepala daerah.

Aspek aseptabilitas berkaitan dengan pertanyaan mengenai siapakah yang pantas menjadi kepala daerah dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon agar dapat terpilih menjadi seorang kepala daerah.

Aspek penting yang kedua, yaitu aspek kapabilitas berkaitan dengan proses seleksi yang dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol untuk memperoleh seorang calon pemimpin yang dapat diandalkan baik yang menyangkut aspek teknis-administratif maupun politis.

Kenyataan di lapangan sering menunjukkan bahwa kriteria mengenai "siapakah yang pantas memimpin suatu daerah" diantara masyarakat pemilih dan partai politik dapat berbeda. Berkaitan dengan kenyataan ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan memerlukan landasan pengetahuan yang memadai, yang dapat diperoleh melalui suatu studi yang mendalam dan obyektif menjawab pertanyaan krusial mengenai "siapa yang pantas memimpin daerah", dari sisi aspirasi masyarakat pemilih (*grassroots level*). Hasil dari studi ini dapat dijadikan acuan bagi para pemimpin parpol di dalam mengambil keputusan untuk mendukung seseorang menjadi calon kepala daerah.

B. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini memusatkan perhatian kepada

1. Kriteria-kriteria kepemimpinan kepala daerah
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada seorang calon kepala daerah.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pendapat, sikap dan penilaian (orientasi politik) masyarakat pemilih terhadap calon kepala daerah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orientasi politik (pendapat, sikap dan penilaian) masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung?

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Dihasilkan laporan penelitian yang obyektif dan akurat mengenai kriteria-kriteria kepemimpinan kepala daerah yang dapat diterima oleh masyarakat pemilih.
2. Dihasilkan suatu laporan penelitian yang obyektif dan akurat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi politik masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

E. MANFAAT YANG DIPEROLEH

1. Masukan bagi pimpinan parpol agar dalam memutuskan "siapa yang pantas" dicalonkan sebagai kepala daerah tidak berbeda dengan apa yang diidam-idamkan (idealkan) masyarakat pemilih.
2. Masukan bagi pimpinan partai politik dalam menyusun strategi kemenangan calon mereka dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

F. KAJIAN PUSTAKA

Konsekuensi langsung dari diundangkannya UU No. 32/2004 adalah perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang sebelumnya menggunakan sistem tak langsung menjadi sistem langsung. Pengenalan pemilihan kepala daerah secara langsung ini memberikan kesempatan bagi dilaksanakannya sistem desentralisasi secara lebih bermakna. Berbagai kajian yang dilakukan diberbagai kawasan dunia menunjukkan bahwa desentralisasi mampu menyediakan landasan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (Smith:1985;

Turner and Hulmer:1997; Peters:2000). Paling tidak ada 6 hal yang menempatkan relevansi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan bergulirnya politik desentralisasi yang bermakna.

Pertama, desentralisasi merupakan ajang pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat untuk mengenal arti penting peran debat politik, seleksi wakil rakyat, perencanaan dan anggaran pemerintah lokal dalam proses demokrasi lokal.

Kedua, desentralisasi merupakan *training ground* bagi kepemimpinan politik lokal untuk mengasah kemampuan mereka sebagai *decision maker* yang cakap, konsultasi publik dan sarana untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Ketiga, desentralisasi memberikan dasar bagi stabilitas politik melalui partisipasi politik yang terarah. Hal ini pada gilirannya menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah lokal akan meningkat sehingga harmoni sosial, semangat kebersamaan dan stabilitas politik dapat dijaga dan ditingkatkan.

Keempat, desentralisasi mengantarkan kita kepada kesetaraan politik(*political equality*) warga. Partisipasi politik yang makin membesar akan memperkecil konsentrasi kekuasaan pada lembaga tertentu. Kekuasaan politik akan lebih terpecah. Ini memberikan kesempatan kepada kaum marginal untuk ikut serta dalam proses politik.

Kelima, desentralisasi akan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal terintegrasi pada suatu sistem yang mempromosikan partisipasi masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan akses yang lebih besar bagi rakyat kebanyakan dalam proses politik.

Keenam, desentralisasi akan meningkatkan kepekaan(*responsiveness*) pemerintah karena sistem perwakilan lokal memberikan kemungkinan bagi dikedepankannya kebutuhan dan situasi lokal serta cara untuk mengurusnya secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung juga berkaitan dengan krisis perwakilan politik dalam 5 tahun terakhir ini. Rakyat tidak mempercayai lagi wakil mereka di lembaga perwakilan daerah karena mereka tidak melihat para wakil rakyat mampu mengelola aspirasi masyarakat secara

efektif. Egosentrisme politik, politik yang mengedepankan kepentingan sendiri dari wakil rakyat, menimbulkan sikap apatis rakyat kepada proses politik. Celakanya, seperti disinyalir oleh David Robertson(2000),” ...*this highly 'unrepresentative' group may be able to force the passage of laws bitterly disliked by a majority of the people..exactly who is being represented, and exactly how democratic representative democracy actually is, can therefore be placed in substantial doubt*” (...kelompok yang tidak representatif ini mempunyai kekuatan untuk membuat aturan/hukum yang sangat tidak disukai oleh kelompok mayoritas...jadi siapa mewakili siapa, dan seberapa demokratis sistem demokrasi perwakilan yang sebenarnya, menjadi pertanyaan yang substansial).

Dalam pandangan ahli-ahli teori dari aliran *public choice* krisis perwakilan politik ini merupakan keniscayaan karena pada dasarnya para politisi, yang bertindak dengan mengatasnamakan rakyat,dalam kenyataan sehari-hari bertindak tidak lebih sebagai *self-maximizer* (mengedepankan kepentingan pribadi/ kelompok) (Buchanan,1998 ;Tullock,1985). Alur pikir ini menempatkan demokrasi perwakilan dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan (Robertson,2000; Tullock,1975). Sebagai *self-miximizers* para politisi jelas tidak akan mampu, atau paling tidak kesulitan, untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Hal ini menjadi lebih buruk lagi jika mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat.

Pilkada langsung secara teoritis memberikan solusi bagi krisis perwakilan tersebut. Peran partai dan badan perwakilan berkurang cukup signifikan dalam proses seleksi pemimpin lokal. Pasal 59 ayat 2 UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon apabila mempunyai perolehan kursi 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD. Meskipun demikian, kita masih melihat adanya peran parpol yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan seleksi calon pemimpin lokal. Parpol dan DPRD masih berperan sebagai satu-satunya pintu bagi bakal calon untuk menjadi calon kepala daerah, karena tidak dikenalnya calon independen dalam UU ini.

Persoalan krusial yang harus dijawab berkaitan dengan proses seleksi dan kriteria apa saja yang harus dipenuhi seorang bakal calon agar dapat dicalonkan oleh suatu partai/gabungan partai. Pengalaman pelaksanaan pemilihan kepala daerah (tidak langsung) di 19 kabupaten dan kota di Jawa Tengah dalam kurun

waktu 1999-2003, menunjukkan kecenderungan proses seleksi dan pencalonan kepala daerah tidak bertumpu pada kriteria yang jelas. Banyak muncul kader-kader partai "tiban" yang kemudian lolos sebagai calon kepala daerah. Intervensi DPP sangat kuat dalam menentukan calon. Sering terlihat, sebagai akibatnya, calon yang didukung partai yang memiliki jumlah kursi mayoritas dalam DPRD dikalahkan calon dari partai minoritas. Kalau yang terjadi dalam proses pilkada tak langsung melalui DPRD ini kita tarik dalam skala luas (pilkada langsung), bukan tidak mungkin hasil yang sama dapat terjadi: calon dari partai mayoritas kalah dalam pilkada langsung karena calon tersebut dipilih sebagai calon jadi tanpa dasar kriteria pemilihan yang rasional.

G. METODE PENELITIAN

G.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif, artinya suatu penelitian yang bermaksud untuk menemukan fenomena-fenomena/kecenderungan-kecenderungan baru tentang sesuatu hal. Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk menemukan kecenderungan mengenai penerimaan atau akseptabilitas responden terhadap calon kepala daerah atau walikota, juga kapabilitas calon kepala daerah atau walikota yang diinginkan responden.

G.2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Kabupaten Blora.

G.3. Penarikan Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling* artinya peneliti dalam menentukan responden berdasarkan anggapan yang menggunakan kaidah ilmiah (*scientific judgement*), dalam hal ini ditetapkan besarnya sampel adalah 245 responden untuk masing-masing kabupaten/kota. Oleh karenanya dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik terhadap populasi penelitian di masing-masing kabupaten/kota tersebut, sehingga 245 responden terpilih untuk masing-masing kabupaten/kota tersebut tinggi tingkat *representativeness*.

Untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap populasi penelitian masing-masing kabupaten/kota dilakukan dengan cara melakukan orientasi lapangan (sebelum penelitian berlangsung) yakni dalam bentuk *mapping* atau pemetaan terhadap kekuatan dan konstelasi politik di masing-masing kabupaten/kota. Setelah pemetaan politik dilakukan barulah didapat peta kekuatan politik di kabupaten/kota.

Berdasarkan peta kekuatan politik tersebut dapat ditentukan berapa besarnya porsi masing-masing kekuatan politik yang akan dijadikan responden. Sehingga dapat ditentukan *quota* atau jatah responden untuk masing-masing kekuatan politik yang ada yang di masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan *political mapping* di kabupaten Blora, maka dipilih 7 kecamatan, yakni: Kecamatan Blora, Jiken, Randublatung, Kedungtuban, Ngawen, Cepu dan Jepon.

G.4. Teknik Analisis

Data kuantitatif yang didapat dari pertanyaan tertutup akan diolah dengan analisa statistik deskriptif dengan program SPSS/PC+, sehingga dapat diketahui distribusi frekuensinya. Sedangkan data kualitatif yang diperoleh dari pertanyaan terbuka akan diolah dan diklasifikasikan juga dengan program SPSS/PC+.